



# KOMISARIS-DIREKSI BANK BUMN 'OBESITAS'

## Prabowo Minta Dirampingkan dan Diisi Profesional

**B**ank BUMN sedang berada di 'musim' perombakan direksi dan komisaris. Para petinggi bank pelat merah tak hanya menjadi sorotan pasar, tapi juga mendapat catatan dari Presiden Prabowo Subianto yang menilai jumlahnya 'obesitas' alias kegemukan. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden memerintahkan agar struktur manajemen BUMN perbankan dibuat lebih ringkas. Dirampingkan serta diisi oleh kalangan profesional saja. Sementara publik menyoroti munculnya nama-nama sosok yang telah menduduki jabatan penting di lembaga lain. Misal, dua pejabat aktif Bank Indonesia (BI) telah resmi menjadi komisaris di BRI dan BNI. Ada juga nama-nama politisi yang mendapatkan kursi di beberapa bank negara tersebut. Bahkan, deretan Wakil Menteri (Wamen) Kabinet Merah Putih juga menghiasi bagan jajaran kepengurusannya bank pemerintah ini. Ekonom menilai hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip good governance yang harusnya dijunjung tinggi. Bisakah menjaga kepercayaan investor dan nasabah?

Baca Hal 11....

## ATURAN TENTANG PENGANGKATAN KOMISARIS DI BUMN

(Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007  
tentang Perseroan Terbatas)

- Pasal 120 Undang-Undang itu menyebutkan anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Utusan.
- Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
- Khusus untuk komisaris independen, juga disebutkan secara khusus syaratnya di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Dalam Pasal 21 POJK 33.2014 disebutkan syarat komisaris independen sebagai berikut:

- bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
- tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
- tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

### ANTREAN PEMBELI ELPIJI DI JAMBI

Jelang lebaran Pemkot Jambi memfasilitasi operasi pasar dengan menyediakan 560 tabung gas elpiji 3 kilogram dengan harga Rp17 ribu per tabung. Antrean warga tampak mengular di Kenali Asam, Kota Baru, Jambi, Rabu (26/3/2025). Peralnya, harga jual gas di tingkat pengecer atau warung setempat berkisar antara Rp40 ribu sampai Rp45 ribu per tabung. (ist.antara)



SELAMAT HARI RAYA

## IDUL FITRI 2025/1446 H

Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dengan kebahagiaan dan kedamaian.

Diberitahukan kepada pembaca setia, Jumat (28/3/2025) Koran Lentera tidak terbit terkait Idul Fitri 1446 H. Terbit kembali pada Senin (7/4/2025). Update berita bisa terus diikuti melalui [www.lentera.co](http://www.lentera.co) dan [www.lenteratoday.com](http://www.lenteratoday.com).

# KPK Sebut 50 Ribu Pejabat Negara Belum Laporkan LHKPN



(Ilustrasi) Petugas Satgas Pendaftaran LHKPN KPK melayani penerimaan pelaporan LHKPN. (Dok)

## DATA SEMENTARA LHKPN DITERIMA KPK

- Baru 366.685 pejabat negara yang telah menyerahkan LHKPN; atau setara 87,92%.
- Artinya terdapat 50.369 penyelenggara negara yang belum melaporkan
- Rincian yang belum Laporkan:

- Ada 37.269 pejabat atau setara 11,17% dari total 333.405 wajib lapor di bidang eksekutif yang belum menyerahkan LHKPN.

- Ada 6.383 anggota dewan atau 30,77% dari total 20.745 wajib lapor di lembaga legislatif.

- Ada 70 orang dari total 17.947 pejabat atau 0,39% wajib lapor di lembaga yudikatif.

- Ada 6.647 pejabat BUMN atau BUMD yang belum melaporkan LHKPN; atau setara 14,78% dari total 44.957 wajib lapor di perusahaan pelat merah.

**\*Batas waktu pelaporannya sampai dengan 31 Maret 2025**

JAKARTA - Sebanyak 417.054 pejabat negara harusnya telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahunan masing-masing ke KPK sebelum 31 Maret 2025 atau enam hari lagi.

Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, data sementara menyebut baru 366.685 pejabat negara yang telah menyerahkan LHKPN; atau setara 87,92%. Lembaga antirasuah tersebut mengimbau para wajib lapor segera menuntaskan penyerahan LHKPN sebelum tenggat waktu.

"Terdapat 50.369 penyelenggara negara yang belum melaporkan harta kekayaannya," tulis Budi dalam pesan singkat dikutip, Rabu (26/3/2025).

"Agar segera memenuhi kewajibannya tersebut. Mengingat batas waktu pelaporannya sampai dengan 31 Maret 2025."

Budi tak merinci asal kementerian dan lembaga dari 50 ribu pejabat yang belum melaporkan LHKPN. Dia hanya memaparkan total wajib lapor pada tiap bidang pemerintahan.

KPK mencatat ada 37.269 pejabat atau setara 11,17% dari total 333.405 wajib lapor di bidang eksekutif yang belum menyerahkan LHKPN. Lembaga antirasuah tersebut juga mencatat ada 6.383 anggota dewan atau 30,77% dari total 20.745 wajib lapor di lembaga legislatif.

Para pejabat di Bidang yudikatif punya kepatuhan yang cukup tinggi. KPK mencatat hanya ada 70 orang dari total 17.947 pejabat atau 0,39% wajib lapor di lembaga yudikatif. Selain itu, KPK juga mencatat ada 6.647 pejabat BUMN atau BUMD yang belum melaporkan LHKPN;

atau setara 14,78% dari total 44.957 wajib lapor di perusahaan pelat merah.

Selain tenggat waktu, Budi juga meminta para pejabat negara untuk melaporkan data LHKPN yang sesuai fakta. Dia mengimbau jangan sampai ada ketidaksesuaian yang ditemukan usai data LHKPN tersebut dipublikasikan pada laman KPK.

Dia mengatakan, KPK hanya akan melakukan verifikasi administratif terhadap data LHKPN yang dilaporkan. Budi pun meminta para pimpinan kementerian, lembaga, dan perusahaan negara untuk mengingatkan anggotanya untuk mematuhi kewajiban pelaporan harta dan kekayaan.

Sebelumnya, KPK juga mengingatkan para kepala daerah yang baru dilantik agar melaporkan LHKPN. Batas akhir laporan adalah 20 Mei 2025.

"Untuk pelaporan LHKPN bagi para kepala daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025, maka batas akhir penyampaian LHKPN-nya adalah tiga bulan pascapelantikan, yaitu 20 Mei," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Budi menjelaskan para kepala daerah itu memang sebelumnya diwajibkan melapor LHKPN sebagai syarat maju pilkada. Namun, jika sudah dilantik, tetap wajib melapor lagi dengan status jabatan baru.

"Para kepala daerah sebelum menjabat tentu saat menjadi cakada diwajibkan melaporkan LHKPN, ada yang menggunakan LHKPN periodik atau LHKPN pada jabatan sebelumnya, ataupun LHKPN khusus untuk pendaftaran kepala daerah," ucap dia.

"Ketika sudah menjabat, status

LHKPN-nya adalah LHKPN pada jabatan baru," tambahnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 orang kepala daerah beserta para wakilnya. Pelantikan serentak ini pertama kali dilakukan dalam sejarah.

Pelantikan digelar di halaman tengah antara Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/1/2025). Acara ini diawali kirab dari Monas menuju Istana. Prabowo kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah.

### Didorong Ada Sanksi

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mempunyai sanksi tegas bagi pejabat yang tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Hal itu disampaikan saat menyoroti soal kedisiplinan pejabat dalam menyetor LHKPN. Menurutnya, KPK harus memiliki sistem tegas untuk membuat pelaporan LHKPN lebih tertib.

"Saya kira KPK harus bekerjasama dengan instansi-instansi, untuk membuat sistem punishment. Jadi bagi penyelenggara negara yang tidak disiplin atau sengaja tidak mau menyetor LHKPN sampai batas waktu tertentu, bakal ada hukuman. Misalnya gaji nggak turun atau ditahan promosi jabatannya," ujar Sahroni dalam keterangan di Jakarta.

Sahroni juga menyuarakan agar para penyelenggara negara lebih taat akan ketentuan yang ada. Mengingat, LHKPN juga merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi.

"LHKPN ini kan sebagai bentuk

transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara kepada masyarakat. Juga sebagai salah satu cara pencegahan korupsi. Jadi kalau ada yang sudah diingetkan berulang-ulang tapi masih enggan melapor, ya berarti patut dicurigai ada sesuatu. Karena kalau bersih, kan tinggal lapor aja apa susahnya," demikian Sahroni.(wid,rls,kcm/dya)

# Soal UU TNI, Ketua MKMK: Pembahasannya Cacat Legislasi

**JAKARTA** - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna, menyebut belum pernah ada pembahasan undang-undang yang tertutup pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

“Belum pernah ada pembahasan undang-undang yang tertutup ini, itu yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, maka saudara-saudara, saya sebenarnya kasihan dengan TNI-nya karena dia yang kemudian menjadi objek dari protes dari berbagai kalangan khususnya dari civil society, padahal ini kan proses politik, itu ada di DPR,” kata I Dewa Gede Palguna dikutip Rabu (26/3/2025)

Bahkan, Palguna mengungkapkan, dirinya sekalipun sulit untuk mengkases naskah akademik RUU TNI. “Bahkan sampai teman saya yang di



BEM SI Kerakyatan kembali menggelar demonstrasi tolak UU TNI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/3/2025) hari ini. (Dok)

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sendiri saya minta dia nggak punya. Coba bayangkan, apa sesungguhnya yang terjadi,” kata dia.

Dalam diskusi Teras FISIP Universitas Udayana (Unud) dengan tajuk Menguak Pengesahan RUU TNI: Apa yang Perlu Diketahui Masyarakat?

pada Selasa, (25/3/2025) di pelataran Ruang Terbuka Hijau Kampus Unud, Sudirman itu, Palguna menerangkan bahwa proses pembahasan RUU TNI cacat legislasi, sebab bertentangan dengan prosedur pembentukan undang-undang yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

“Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa selain keharusan ada naskah akademik, proses itu harus dimuat dalam Prolegnas (program legislasi nasional), ini tidak ada, tidak muncul dalam prolegnas dan tiba-tiba Presiden Prabowo pada tanggal 18 Februari lalu mengirim surat, surat presiden ke DPR untuk membahas ini. Apa isinya juga publik tidak tau, tidak masuk prolegnas, jadi secara proses ini kemudian menimbulkan pertanyaan,” ujar dia.

Selain itu, sebagaimana yang termaktub dalam UU No.12 Tahun 2011, Palguna menjelaskan, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat pula prinsip partisipasi bermakna atau meaningful participation yang wajib dipatuhi. Namun, dalam kasus ini justru dilangkahi DPR.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 ditegaskan apa itu yang disebut meaningful participation, ada tiga unsur di dalamnya, pertama masyarakat berhak untuk didengar, di dengar pendapatnya. Kedua, isinya adalah pendapat masyarakat berhak untuk dipertimbangkan, yang ketiga masyarakat berhak untuk mendapatkan jawaban atas pendapat yang telah disampaikan itu, ini semuanya tidak ada,” ujar dia.

Dalam kasus ini, Guru Besar Fakultas Hukum Unud itu kemudian menilai bahwa proses politik yang tidak mempertimbangkan prinsip-

prinsip tersebut, berpotensi mengadu domba TNI dan masyarakat sipil.

“Siapa yang di adu dalam tanda petik ya, siapa yang diadu oleh undang-undang ini? Ya, rakyat dengan TNI kan itu yang diadu, padahal yang tidak beres kan proses politiknya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini cara-cara yang begini ini sangat saya sesalkan, karena harusnya tidak boleh terjadi dalam proses demokrasi kita yang sudah melampaui masa reformasi lebih dari seperempat abad ini,” kata Palguna.

Lebih lanjut, Palguna juga menanggapi pernyataan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi yang menyebut revisi UU TNI tidak memperluas kewenangan, tetapi menegaskan pembatasan, Palguna menilai, sulit untuk mempercayai pernyataan itu di tengah nihilnya transparansi pemerintah.

“Bagaimana kita bisa mempercayai itu kalau sampai sekarang naskahnya nggak kita dapatkan, bagaimana kita bisa diyakinkan dengan pernyataan itu kalau sampai detik saya bicara sekarang ini naskahnya tidak didapatkan dan pembahasan dilakukan secara tertutup dengan melanggar transparansi, tidak ada partisipasi publik yang bermakna, tidak ada naskah akademik yang bisa diakses oleh publik tidak juga masuk dalam prolegnas, bagaimana kita bisa diyakinkan bahwa pernyataan itu benar, kan itu persoalannya,” kata dia.

Di sisi lain, dalam kesempatan yang sama, turut hadir Kolonel Inf Ronald Sumendap dari Kodam Udayana. Ketika ditanya ihwal dwifungsi TNI, Ronald menyatakan hal serupa dengan Kapuspen.

“Intinya itu kan hanya memperkuat tugas kita yang sebetulnya sebelumnya sudah kita laksanakan, contoh tadi disampaikan masalah BNPB, jadi tidak ada untuk dalam rangka mengambil tugas-tugas dari sipil atau Kementerian lainnya, tidak ada itu. Dalam rangka membatasi juga sebetulnya. Bahwa tugas kita itu sudah jelas,” kata dia.

Dia juga menegaskan bahwa TNI telah memiliki sistem pembinaan karier yang jelas untuk memastikan peran TNI tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan.

“Kita ada sistem pola binkarnya, pola pembinaan kariernya itu jelas, kan sudah dijelaskan kalau ada yang diluar dari 14 KL yang ada itu otomatis harus pensiun” kata dia. (din, ist, rls, ant/dya)

**Selamat Hari Raya  
Idul Fitri  
1446 H**

**Eid Mubarak 1446 H**  
Semoga di hari kemenangan ini kita menjadi manusia yang lebih baik dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT

Bank Jatim bertani & diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan peserta penjamin LPS

WWW.BANKJATIM.CO.ID

# Usai Sebut Ormas Minta THR Sebagai Budaya, Wamenag Klarifikasi: Tetap Dilarang

**JAKARTA** - Wakil Menteri Agama atau Wamenag Raden Muhammad Syafi'i akhirnya memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang sempat menimbulkan polemik. Sebelumnya, Syafi'i sempat mengatakan bahwa fenomena organisasi masyarakat yang meminta dana tunjangan hari raya atau THR ke para pengusaha sebagai bagian dari budaya.

Syafi'i mengatakan, dirinya tegas menolak aksi ormas yang kerap meminta THR menjelang lebaran tersebut. Menurut Syafi'i, tindakan semacam itu sangatlah buruk dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. "Meminta apalagi dengan memaksa, itu jelas bukan budaya kita," katanya seperti dikutip dari rilis resmi Kementerian Agama, Rabu (26/3/2025).

Dia menegaskan, Kementerian Agama tidak pernah menyetujui adanya aksi-aksi permintaan THR oleh para ormas. Sebabnya, dari sudut pandang agama, hal tersebut jelas sangat dilarang. "Agama tidak mengajarkan hal itu. Karenanya, tidak seharusnya dilakukan. Kita tolak itu," ucap Syafi'i. "Agama mengajarkan untuk memberi, bukan meminta."

Terkait dengan pernyataan yang sempat ia lontarkan sebelumnya, Syafi'i menilai ada kesalahpahaman. Budaya yang dimaksud olehnya adalah budaya saling berbagi, bukan budaya

meminta-minta. "Yang saya maksud sebagai budaya kita itu saling memberi, terlebih di Hari Idul Fitri. Sejak dulu, kita diajarkan untuk peduli," ujarnya.

Sebelumnya ramai di media sosial terkait respons dari Syafi'i terhadap tindakan ormas yang kerap kali meminta THR ke para pengusaha jelang hari raya lebaran. Kala itu, Syafi'i menanggapi santai ketika ditanyakan perihal fenomena tersebut.

"Saya rasa itu budaya lebaran Indonesia sejak dahulu kala. Nggak perlu dipersoalkan," kata Syafi'i dalam video yang beredar di jagat dunia maya seperti dikutip Tempo, Rabu, 26 Maret 2025. "Ya kadang-kadang dapat. Kadang-kadang enggak," ujar Syafi'i sembari tertawa.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pernyataan yang dilontarkan oleh Syafi'i bukan sikap resmi dari Kementerian Agama. Dia menegaskan, pernyataan itu merupakan pandangan pribadi Syafi'i dan tidak ada sangkut paut dengan Kementerian Agama. "Itu pernyataan pribadi Wakil Menteri Agama," kata Nasaruddin lewat aplikasi pesan singkat, Rabu (26/3/2025).

Pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio menilai fenomena organisasi masyarakat (ormas) yang meminta dana tunjangan hari raya



Wakil Menteri Agama atau Wamenag Raden Muhammad Syafi'i

(THR) ke perusahaan-perusahaan berakar dari masalah ekonomi. Hal tersebut yang kemudian membuat anggota ormas tersebut meminta bantuan dana ke para pengusaha di daerah mereka tinggal.

"Itu kan orang-orang pengangguran. Ada orang putus sekolah, macam-macam," kata Agus ketika dihubungi lewat sambungan telepon pada Rabu (26/3/2025).

Agus menjelaskan fenomena tersebut terus terjadi karena rerata masyarakat tidak memiliki penghasilan tetap. Hal ini kemudian diperparah dengan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin meningkat sehingga jumlah pengangguran terus bertambah.

Kondisi ekonomi yang buruk tersebut kemudian memaksa sebagian orang untuk melakukan hal kurang terpuji, termasuk meminta permohonan bantuan dana ke para pengusaha dengan mengatasnamakan ormas. "Malak kelas kambing kan (namanya). Dia buat makan," ujar Agus.

Persoalan tersebut, kata Agus, hanya dapat diselesaikan bila pemerintah mau turun tangan dan melakukan perbaikan dari hulu, dalam hal ini mengurangi angka pengangguran. Agus menegaskan pemerintah perlu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga fenomena ormas minta THR tersebut tidak lagi terjadi. (wid, rls, ant/dya)

## Manufaktur RI Melambat, 2 Industri Beri Pengaruh Buruk



(Ilustrasi) Pekerja menyelesaikan pembuatan perangkat alat elektronik rumah tangga di PT Selaras Citra Nusantara Perkasa (SCNP), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Dok)

**JAKARTA**- Jelang Lebaran 2025, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan Maret 2025 mengalami perlambatan 0,17 poin dibandingkan Februari 2025 yang tercatat 53,15 atau melambat 0,07 poin dibandingkan dengan Maret tahun lalu. Pada bulan lalu IKI manufaktur RI berada di angka 52,98 atau sebenarnya masih di level ekspansi

"Perlambatan IKI pada Maret ini

salah satunya karena adanya libur Lebaran, yang biasanya produksi ikut mengalami penurunan. Perusahaan meningkatkan produksinya dua atau tiga bulan sebelum Ramadan dan Lebaran untuk dapat memenuhi peningkatan permintaan bulan Ramadan hingga Lebaran," kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arief dalam rilis IKI virtual, Rabu

(26/3/2025).

Adapun ekspansi IKI bulan Maret ini ditopang oleh geliat dari 21 subsektor dengan kontribusi terhadap PDB industri pengolahan non-migas pada triwulan IV tahun 2024 sebesar 96,5 persen. Jadi, dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, terdapat dua subsektor yang mengalami kontraksi.

"Untuk dua subsektor dengan nilai IKI tertinggi (ekspansi) adalah industri pencetakan dan reproduksi media rekaman (KBLI 18) serta industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional (KBLI 21). Sedangkan dua subsektor yang mengalami kontraksi adalah industri furnitur (KBLI 31) serta industri karet, barang dari karet dan plastik (KBLI 22)," sebutnya.

IKI bulan Maret juga dipengaruhi oleh ekspansinya seluruh variabel pembentuk IKI yaitu pesanan baru, produksi dan persediaan. Variabel pesanan baru tetap ekspansi meskipun mengalami perlambatan sebesar 0,88 poin dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 53,69.

Di sisi lain, variabel produksi mengalami peningkatan ekspansi

sebesar 0,66 poin dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 51,21. Demikian juga dengan persediaan yang tetap ekspansi dengan peningkatan sebesar 0,34 poin dibanding bulan lalu menjadi 53,86.

Penurunan demand luar negeri akibat kondisi ketidakpastian global yang semakin sulit diduga ikut menyebabkan perlambatan IKI pesanan baru khususnya pesanan luar negeri. Meskipun demikian, peningkatan level ekspansi produksi dan persediaan menunjukkan geliat ekonomi penyerapan produk industri manufaktur di dalam negeri yang cukup tinggi di bulan Maret 2025.

"Momentum bulan Ramadan dan persiapan Hari Raya merupakan salah satu pemicu peningkatan kinerja industri manufaktur karena meningkatkan mampu demand domestik produk manufaktur. Namun daya angkatnya berkurang karena tekanan banjir produk impor murah," ujar Febri. (wid, rls ist/dya)

# Kenaikan Harga Bawang Putih Janggal, Kemendag Diminta Waspada

**JAKARTA** - Deputi III Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewaspada kenaikan harga bawang putih yang kini tembus Rp 50 ribu per kilogram di sejumlah tempat. Kenaikan harga ini disinyalir karena impor yang lamban terealisasi.

"Ini mohon untuk menjadi perhatian, terutama dari instansi terkait dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan," kata Edy yang juga pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), dikutip Rabu (26/3/2025).

Edy mengatakan, kenaikan bawang putih telah berlangsung cukup lama. Menurut dia, tren harga produk hortikultura ini, konsiten menunjukkan kecenderungan kenaikan. Berhubung bawang putih merupakan komoditas mayoritas impor, Edy meminta Kemendag memeriksa masalah dalam realisasi impor. Hal ini dikatakannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (24/3/2025).

Bulan ini, Edy mengungkapkan, harga rata-rata bawang putih telah naik 3,42 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Selisih harga aktual dengan harga acuan pemerintah (HAP) hampir mencapai 20 persen. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan.

Janggalnya, kenaikan harga secara fantastis terjadi di sejumlah tempat di Jakarta yang relatif tak memiliki kendala geografis. Edy mengungkap, empat kota administratif di Jakarta, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat masuk dalam 10 daerah dengan harga bawang putih tertinggi, yakni berkisar antara Rp 51 ribu hingga Rp 54.333 per kilogram.

Sedangkan harga tertinggi ada di wilayah Nabire dan Manokwari. Edy menilai hal ini wajar mengingat aksesnya cukup sulit. "Kalau Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Majalengka harganya tinggi. Ini perlu perhatian khusus. Sebab di daerah lain masih cukup banyak yang harganya di bawah Rp 40 ribu per kg. Ini yang harus kita pertanyakan," ujar Edy.

Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Pengamanan Pasar Kemendag Tommy Andana melaporkan, realisasi impor bawang putih baru 35.292 ton atau 15,61 persen dari total persetujuan impor (PI) yang sudah diterbitkan sebanyak



Harga bawang putih naik menjadi Rp 50.000 per kg, di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) Rp 38.000 per kg. (dok)

226.101 ton. Adapun alokasi PI tahun ini 589.720 ton dari alokasi kebutuhan impor 550.000 ton.

Tommy mengatakan, para importir memberikan jawaban mengambang ketika ditanya ihwal lambannya realisasi impor. Alasan itu di antaranya

faktor cuaca dan tingginya kurs dolar Amerika Serikat (AS). Ada pula yang khawatir barang akan dijadikan stok operasi pasar. "Itu yang sudah kami tekankan dan kami panggil untuk segera realisasikan PI," ujar Tommy. (wid, ist, rls/dya)

## Importir Dipanggil, Dorong Percepat Realisasi

**KEMENTERIAN** Perdagangan (Kemendag) sudah memanggil para importir bawang putih karena harga komoditas tersebut naik menjadi Rp 50.000 per kg. Harga itu jauh di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) Rp 38.000 per kg.

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim, mengatakan melonjaknya harga bawang putih belakangan ini dipicu sebagian importir belum mendapat pemasok komoditas tersebut.

"Minggu kemarin (importir dipanggil) terus mereka sudah ada rencana untuk memasukkan bawang putih ke dalam negeri," kata Isy ketika ditemui wartawan di Pasar Kebon Kembang, Kota Bogor, Rabu (26/3/2025).

Isy meminta ke para importir bawang putih untuk merealisasikan impor secepatnya. Sehingga permintaan bawang putih di dalam negeri terpenuhi.

"Secepatnya, pokoknya disesuaikan dengan kemampuan dia. Pokoknya mereka bilang enggak ada kendala sih," ujar Isy.

Senada, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, mengakui tantangan saat ini ada di realisasi impor bawang putih. Ia

mengungkapkan saat ini sudah ada 30 persetujuan impor komoditas bawang putih.

"Itu kan butuh proses tuh karena itu impor kan, kita kan 99 persen itu impor dari China (bawang putih). Tinggal proses bisnisnya aja business to business," ujar Iqbal di kesempatan yang sama.

Iqbal menampik alasan ada tindakan penyelewengan terkait realisasi impor yang mengalami tantangan. Menurutnya, jika ada penahanan terhadap laju bawang putih maka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

"Sampai sekarang kita masih terus melakukan investigasi. Tapi kelihatan kok dari realisasi impornya berapa dan mereka distribusikan dalam negeri berapa," ungkap Iqbal.

Iqbal mengimbau masyarakat tak perlu khawatir terhadap kenaikan harga bawang putih di pasaran. Menurutnya, konsumsi bawang putih rumah tangga tak begitu banyak seperti bawang merah.

"Makanan-makanan yang membutuhkan konsumsi bawang putih yang banyak itu adalah chinese food. Penggunaan bawang putih dengan bawang merah kalau kita di Indonesia itu kan nggak begitu signifikan lah dibandingkan bawang merah," tutur Iqbal.

### Harga Bawang Putih (Sedang) Per 26/3/2025

Sulawesi Selatan

Rp 44.050

Sumatera Utara

Rp 47.700

Sulawesi Barat

Rp 47.500

Kalimantan Barat

Rp 43.250

Sumatera Barat

Rp 43.150

Jambi

Rp 43.000

Kalimantan Selatan

Rp 42.650

Riau

Rp 42.450

Jawa Timur

Rp 40.200

Bali

Rp 39.750

Kepulauan Riau

Rp 35.350

Sumber: Badan Pangan Nasional

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut izin impor bawang putih untuk kuota 2025 sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Katanya, tinggal menunggu realisasi impor saja.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional Bank Indonesia (BI), harga bawang putih hari Rabu (26/3) naik tipis Rp 2.300 menjadi Rp 48.800 per kg. Sedangkan, mengacu Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga bawang putih hari ini ada di angka Rp 44.191 per kg. (wid, ist, kum/dya)

# Pemkot Batu Siapkan Skema Rekayasa Lalin Hadapi Kepadatan Arus Lebaran 2025



Pertigaan Jalan Imam Bonjol, jalan alternatif menuju Surabaya lewat kelurahan Temas, Rabu (26/3/2025). (Santi/Lenteratoday)

**BATU** - Menghadapi lonjakan arus mudik dan wisatawan saat Lebaran 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu telah menyiapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kelancaran arus kendaraan, meminimalisir kemacetan, serta memberikan kenyamanan bagi pemudik dan wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu, Hendry Suseno, menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai

instansi, termasuk Polres Batu, untuk meningkatkan efektivitas pengamanan serta pengaturan lalu lintas selama periode mudik.

"Kami sudah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana, termasuk rambu-rambu lalu lintas, serta tanda penunjuk arah. Selain itu, kendaraan operasional seperti mobil patroli dan kendaraan derek juga telah disiagakan di

beberapa titik strategis untuk mengantisipasi kendala di lapangan," ujar Hendry, Rabu (26/3/2025).

Hendry mengatakan, salah satu kebijakan baru yang diterapkan pada arus mudik tahun ini adalah rekayasa lalu lintas di beberapa titik krusial. Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kapolres Batu, akan terdapat skema baru di kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) di Jalan Suropati.

"Misalnya di pertigaan TMP Suropati, itu kalau dari atas, arah Jalan Sultan Agung ke kanan kan masuk ke

Pesanggrahan, itu dibuat satu arah. Tetapi nanti lihat kepadatan arus lalinnya. Kalau kepadatannya sudah masuk di 5 Km/jam, nah itu berarti bisa diterapkan," jelasnya.

Lebih lanjut, Hendry menyampaikan, berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Gubernur dan Forkopimda se Jawa Timur, libur panjang Nyepi dan Lebaran 2025 berpotensi menambah arus kendaraan yang memasuki Kota Batu, baik dari jalur utama maupun jalur alternatif.

Untuk mengantisipasi kepadatan, Dishub bersama Polres Batu juga telah menyiapkan beberapa jalur alternatif. Bagi kendaraan dari arah Pendem yang hendak menuju pusat Kota Batu, dapat diarahkan melalui Kecamatan Junrejo menuju Jalan Hayam Wuruk. Sementara itu, bagi yang hendak keluar Kota Batu ke arah Surabaya, bisa mengambil rute melalui Kelurahan Temas, yang nantinya akan tembus ke Pendem.

"Imbauan saya, jangan takut ke Kota Batu. Karena kami dengan Polres, TNI, Garnisun, dan seluruh stakeholder terkait sudah sangat siap untuk menyambut dan mengamankan serta membuat nyaman pemudik dan wisatawan," pungkasnya.

Selain Dishub, Polres Batu juga

telah memetakan delapan titik yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas dan membutuhkan rekayasa. Kasat Lantas Polres Batu, AKP Kevin Ibrahim, menjelaskan titik-titik tersebut meliputi kawasan Arhanud, Pendem, Jatim Park 2 dan 3, TMP Suropati, Simpang Empat Pesanggrahan, Simpang Tiga Bendo, dan San Terra Pujon.

"Misalnya, di Arhanud akan dipasang barrier di median jalan agar kendaraan tidak bisa langsung menyeberang ke Simpang Tiga Pendem. Kendaraan akan diarahkan belok kiri terlebih dahulu sebelum memutar," jelas Kevin.

Jika terjadi lonjakan kendaraan yang signifikan, Polres Batu juga mempertimbangkan penerapan skema contraflow maupun sistem satu arah. Namun, penerapan kebijakan ini akan bersifat situasional dan bergantung pada kondisi di lapangan.

Kevin menuturkan, salah satu skenario contraflow yang paling mungkin diterapkan adalah di jalur Pendem hingga simpang tiga Jalan Dewi Sartika. Pada saat arus mudik, akan diberlakukan dua lajur naik dan satu lajur turun, sementara pada arus balik, dua lajur akan digunakan untuk turun dan satu lajur untuk naik. (Santi/Dya)

## Polemik Lahan Sekolah

# Pemkot Malang Pertimbangkan Sewa dari UM

**MALANG**- Pemkot Malang akan mempertimbangkan opsi penyewaan lahan milik Universitas Negeri Malang (UM) yang saat ini digunakan oleh beberapa sekolah, termasuk SDN Percobaan 1, SDN Sumpersari 3, SMPN 4, dan SMAN 8 Malang. Hal ini menyusul permintaan UM untuk mengembalikan aset mereka, yang telah diajukan sejak 2019.

Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, mengungkapkan UM sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) memiliki kebutuhan untuk memanfaatkan asetnya secara lebih maksimal. Salah satu fokus utama mereka adalah lahan yang saat ini digunakan oleh SMAN 8 Malang, meskipun SMA merupakan kewenangan Pemprov.

"Animo mahasiswa ke UM juga meningkat, mereka butuh ruang kelas baru. Selain itu, ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar aset digunakan sesuai peruntukannya. Kalau tidak, bisa mendapat teguran," ujar Ali Muthohirin, Rabu (26/3/2025).

Selain rekomendasi dari BPK, Ali

menuturkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menegaskan aset negara harus bisa "berkeringat", yaitu menghasilkan keuntungan atau manfaat maksimal. Dalam hal ini, lahan yang digunakan oleh sekolah-sekolah tersebut tidak masuk dalam kategori pemanfaatan untuk pendidikan tinggi.

Dalam mencari solusi, Pemkot Malang menyatakan kesiapannya untuk bernegosiasi dengan UM, termasuk mempertimbangkan skema sewa lahan.

"Saat ini belum ada skema sewa yang dilakukan. Tapi kalau memang UM bersedia menyewakan lahannya kepada Pemkot, kami akan melakukan itu. Tinggal teknisnya nanti dibahas oleh tim dari Dindik dan pihak UM," jelas Ali.

Menurutnya, skema sewa dapat menjadi solusi agar sekolah tetap beroperasi di lokasi yang sama, sembari memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan aset UM. Namun, masih perlu dibahas lebih lanjut terkait besaran biaya sewa, durasi kontrak, serta kemungkinan

diberikan waktu bagi sekolah untuk mempersiapkan relokasi jika diperlukan.

"Kita bisa sepakati misalnya sewa berapa tahun, lalu diberi kesempatan untuk membangun yang baru karena kan butuh waktu. Ini nanti yang akan dibahas oleh tim teknis agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik Pemkot, UM," tambahnya.

Namun, Ali menegaskan keputusan terkait SMAN 8 Malang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, untuk SD dan SMP, Pemkot masih berharap agar sekolah-sekolah tersebut tidak dipindahkan jika tidak ada kebutuhan mendesak dari UM.

"Kami ingin mencari solusi terbaik. Jika memungkinkan, kami tidak ingin sekolah dipindahkan. Namun, jika memang harus ada



Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin. (Santi/Lenteratoday)

perubahan, maka harus ada skema yang jelas dan tidak merugikan pihak manapun," tutup Ali.

Sebelumnya, UM diketahui telah mengirimkan surat imbauan kepada beberapa sekolah di atas lahannya untuk mencari lokasi baru, mengingat masa pinjam pakai akan segera berakhir. (Santi/Dya)

# Misi Pemadaman Berakhir Duka, Heli Damkar Korsel Jatuh

**GYEONGBUK** - Sebuah helikopter pemadam kebakaran yang sedang berupaya mengatasi kebakaran hutan besar di Korea Selatan jatuh pada Rabu (26/3/2025), menyebabkan pilot tewas, menurut pernyataan dinas pemadam kebakaran kepada AFP.

"Helikopter yang memadamkan kebakaran hutan jatuh di area pegunungan di Uiseong," ujar pejabat dari Dinas Pemadam Kebakaran Gyeongbuk.

"Kami mendapat informasi bahwa terdapat satu pilot yang dinyatakan meninggal di lokasi kejadian."

Kecelakaan terjadi saat pihak berwenang berupaya keras mengendalikan salah satu kebakaran hutan terbesar di tenggara Korea Selatan.

Kebakaran ini telah menewaskan sedikitnya 19 orang dan menghancurkan kuil Buddha kuno.

Pemerintah Korea Selatan langsung mengandangkan seluruh armada helikopter pemadam usai kecelakaan tersebut.

Menurut laporan Kementerian Keamanan Dalam Negeri Korsel yang dikutip CNN, kebakaran hutan meluas dipicu oleh udara kering dan angin kencang. Beberapa situs bersejarah ikut terancam.

Di antara korban tewas terdapat empat pegawai negeri sipil yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran.

Salah satu bangunan bersejarah yang dilalap api adalah Kuil Gounsa yang berusia 1.300 tahun di Uiseong. Foto dari Ordo Jogye Buddha Korea menunjukkan bahwa bangunan utama

Asap mengepul dari kebakaran hutan yang melanda wilayah Andong, Korea Selatan, Selasa (25/3/2025). (Reuters)



hangus, hanya menyisakan lonceng upacara.

Sejumlah artefak yang ada di kuil tersebut, termasuk patung Buddha duduk yang ditetapkan sebagai warisan nasional, berhasil diselamatkan. Artefak-arterfak itu telah dipindahkan ke kuil lain sebelum api mendekati.

Lebih dari 10.000 personel—terdiri dari pemadam kebakaran, polisi, dan pegawai pemerintah—dikerahkan ke berbagai wilayah selatan sejak puluhan titik api mulai muncul pada akhir pekan lalu.

Hingga Rabu (26/3/2025), kebakaran telah menghancurkan lebih dari 17.398 hektar lahan.

Perdana Menteri Korea Selatan sekaligus pejabat presiden sementara, Han Duck-soo, menyatakan bahwa kebakaran ini merupakan yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Otoritas di Andong dan wilayah tenggara lainnya memerintahkan evakuasi warga pada Selasa

(25/3/2025). Angin kencang dan udara kering menyulitkan upaya pemadaman.

Hingga Rabu, 68 persen kebakaran di wilayah Uiseong dan Andong berhasil dikendalikan.

Dalam beberapa hari terakhir, kebakaran meluas di kawasan Uiseong dan mendekati Desa Rakyat Hahoe di Andong yang merupakan situs Warisan Dunia UNESCO.

Warga desa diminta mengungsi. Petugas pemadam kebakaran melindungi rumah-rumah tradisional atau hanok dengan menyemprotkan air di sekeliling area.

Kebakaran hutan Korea Selatan bermula pada Jumat (21/3/2025), dipicu percikan api dari mesin pemotong rumput di Sancheong, Provinsi Gyeongsang Selatan, sekitar 300 kilometer di selatan Seoul.

## Peringatan Krisis

Diketahui pemerintah telah menaikkan peringatan krisis ke tingkat tertinggi dan mengambil langkah langka dengan memindahkan ribuan narapidana dari penjara di daerah tersebut. "Kebakaran hutan yang terjadi selama lima hari berturut-turut... menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata presiden sementara Korea Selatan, Han Duck-soo.

Dia mengatakan dalam rapat keselamatan darurat dan bencana, bahwa kebakaran "meningkat dengan cara yang melampaui model prediksi yang ada dan ekspektasi sebelumnya."

"Sepanjang malam, kekacauan terus berlanjut karena kabel listrik dan komunikasi terputus di beberapa daerah dan jalan-jalan ditutup," tambahnya. Di kota Andong, beberapa pengungsi yang berlindung di gedung olahraga sekolah dasar mengatakan kepada AFP, bahwa mereka harus

## Kasus Kebakaran di Korea Selatan

**Kebakaran Apartemen Seoul (Jan 2015):** Kebakaran hebat menewaskan 3 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya.

**Kebakaran Apartemen Ulsan (Okt 2020):** Gedung 33 lantai terbakar akibat angin kencang, 88 orang luka-luka, tanpa korban jiwa.

**Kebakaran Apartemen Dobong, Seoul (Des 2023):** Api muncul di lantai tiga gedung 23 lantai, menewaskan 2 orang dan melukai 29 lainnya.

**Kebakaran Pabrik Baterai Hwaseong (Jun 2024):** Ledakan pada unit penyimpanan baterai lithium menewaskan 23 pekerja.

**Kebakaran Pabrik Aricell (Jun 2024):** Ledakan baterai menyebabkan kebakaran yang menewaskan 22 pekerja dan melukai 8 lainnya.

**Kebakaran Mobil Listrik (Agu 2024):** Kebakaran di basement apartemen akibat mobil listrik mendorong larangan parkir EV di area basement.

**Kebakaran Gedung Komersial Seongnam (Jan 2025):** Api melanda gedung 8 lantai, 30 orang diselamatkan, 12 luka akibat asap.

**Kebakaran Hutan Tenggara Korsel (Mar 2025):** Kebakaran besar menewaskan 18 orang, menghancurkan 200 bangunan, dan membuat 27.000 warga mengungsi.

**Kebakaran Merusak Kuil Gounsa (Mar 2025):** Kebakaran hutan menyebar hingga merusak kuil berusia 1.300 tahun.

melarikan diri begitu cepat sehingga tidak dapat membawa apa pun.

"Anginnya sangat kencang," Kwon So-han, seorang warga Andong berusia 79 tahun mengatakan kepada AFP. Dia menambahkan bahwa begitu mendapat perintah evakuasi, ia melarikan diri.

Otoritas telah menggunakan helikopter untuk memadamkan api, tetapi menghentikan semua operasi tersebut setelah sebuah helikopter jatuh pada hari Rabu, menewaskan seorang pilot di dalamnya. Pihak berwenang mengatakan perubahan pola angin dan cuaca kering telah mengungkap keterbatasan metode pemadaman kebakaran konvensional.

Ribuan petugas pemadam kebakaran telah dikerahkan, tetapi "angin kencang yang mencapai kecepatan 25 meter per detik terus berlanjut sejak kemarin sore hingga malam, yang memaksa penghentian operasi helikopter dan pesawat nirawak," kata presiden sementara Korsel, Han Duck-soo. (Reuters, AFP, ist/nei)



Reruntuhan Kuil Gounsa yang berusia 1.300 tahun di Uiseong, Korea Selatan, yang terbakar dalam kebakaran hutan Korsel pada Rabu (26/3/2025). (AFP)

# Memendam Emosi, Bahaya untuk Kesehatan Perempuan!

**ADAKAH** di antara kalian yang sering menahan emosi dan memendam kemarahan? Banyak perempuan yang memilih untuk menelan emosi mereka daripada meluapkannya, karena berbagai alasan. Mungkin kamu pernah melakukan hal yang sama.

Meskipun hal ini terkesan lazim dialami oleh banyak perempuan, memendam amarah bisa berdampak buruk pada kesehatan fisik serta mental. Bahkan, dilansir Independent, ada beberapa penyakit yang ternyata berkaitan dengan emosi terpendam ini.

Psikolog Amerika Serikat Dana Jack menelurkan penelitian pada akhir 1980-an yang mengidentifikasi pola pada pasien perempuannya. Pola tersebut adalah kecenderungan untuk self-silencing atau memerintahkan diri sendiri untuk diam; menekan kebutuhannya; menyenangkan orang lain; dan menghindari konflik. Dana Jack pun mengaitkan perilaku tersebut dengan peningkatan risiko depresi.

Studi terbaru dari University of Pittsburgh kemudian mengungkap, amarah yang tertahan dalam tubuh perempuan non-kulit putih (women of colour) punya korelasi dengan 70 persen peningkatan risiko aterosklerosis (penyempitan pembuluh darah arteri). Ini kemudian meningkatkan risiko perempuan mengalami

penyakit jantung.

Menurut Dokter Spesialis Endokrin Dr Jolene Brighten, emosi terpendam juga berkaitan dengan perburukan kondisi penyakit autoimun. Sebab, amarah yang tertahan ini berkaitan dengan disfungsi fungsi imun. Akhirnya, kondisi seperti lupus, sklerosis, dan rheumatoid arthritis bisa semakin buruk.

“Menahan emosi, terutama amarah, memiliki hubungan dengan peningkatan stres, fungsi imun yang terganggu, dan peradangan kronis yang bisa berkontribusi pada terjadinya atau memburuknya penyakit autoimun,” kata Jolene, dikutip dari Independent.

Memang, bagaimana caranya tubuh merespons emosi dan amarah yang terpendam? Emosi merupakan fenomena biologis yang dimediasi lewat aktivitas otak, perubahan sistem saraf, dan sekresi hormon. Emosi itu tidak berbahaya, tetapi yang bisa berbahaya adalah bagaimana kita merespons dan mengolah emosi tersebut.

Menurut Psikolog Kesehatan Dr Sula Windgassen, ketika seseorang memendam dan menahan emosinya, perilaku ini mengaktifkan bagian-bagian otak tertentu seperti prefrontal cortex. Di waktu yang bersamaan, otak menurut

nkan aktivitas di bagian yang bertugas memproses emosi, seperti amigdala. Alhasil, sekresi kortisol meningkat dan berpotensi mengganggu fungsi imun.

“Kortisol bisa mengganggu respons imun, membuat sistem bereaksi dengan lambat atau bahkan mengaktifkannya secara berlebihan. Ini bisa berujung pada inflamasi, yang merupakan tanda disfungsi imun,” papar Sula.

Lantas, apa yang bisa dilakukan agar kita tidak memendam emosi? Tentunya, emosi dan amarah harus disalurkan lewat cara yang sehat. Marah-marah, membentak, dan menjadikan orang lain sebagai “samsak” emosi sama sekali tidak dibenarkan.

Para ahli menyarankan perempuan untuk banyak berolahraga, melakukan latihan pernapasan, mempraktikkan mindfulness yang menenangkan, serta menjalani hobi-hobi menyenangkan. Jika membutuhkan intervensi lebih, kita bisa menemui ahli profesional seperti psikolog atau konselor untuk menjalani terapi.

“Mengekspresikan rasa marah dengan cara yang konstruktif bisa mengurangi risiko disfungsi imun dan inflamasi yang berkaitan dengan stres,” tegas Dr Sula.

## Macam-Macam Bahaya Memendam Emosi

Meski tidak berbentuk, emosi sering kali memiliki pengaruh yang besar pada kehidupan. Jadi, tidak heran jika memendam emosi yang seharusnya disampaikan bisa berdampak negatif pada diri kita. Berikut ini adalah beberapa bahaya memendam emosi yang perlu diwaspadai:

### Melemahkan sistem kekebalan tubuh

Memendam emosi memang tidak akan langsung menyebabkan suatu penyakit. Namun, kondisi ini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga membuat Anda lebih mudah terserang berbagai jenis penyakit, mulai dari penyakit ringan seperti pilek, hingga penyakit kronis seperti kanker.

### Mengakibatkan kecemasan berlebih

Emosi yang dipendam terus-menerus juga bisa menyebabkan gangguan cemas. Gangguan cemas berkepanjangan mengakibatkan otak memproduksi hormon stres secara berkala. Hal ini pada akhirnya bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik, seperti sakit kepala, mual, muntah, hingga kesulitan bernapas.

### Mengakibatkan depresi

Emosi negatif yang tidak tersalurkan dengan baik juga dapat mengakibatkan depresi. Jika sudah sampai pada tahap ini, emosi negatif akan berubah menjadi perasaan hampa, putus asa, bahkan perasaan ingin mengakhiri hidup.

Gejala yang timbul akibat depresi antara lain adalah sering merasa lelah, sulit tidur pada malam hari, dan kehilangan ketertarikan pada hal-hal yang biasanya Anda sukai. Depresi juga bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti sakit kepala, penurunan berat badan, hingga gangguan pernapasan.

### Menyebabkan berbagai penyakit kronis

Produksi hormon stres yang tinggi akibat kebiasaan memendam emosi secara terus-menerus dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan tubuh, terutama dalam hal peningkatan detak jantung dan tekanan darah. Saat seseorang mengalami stres berkepanjangan, tubuh akan terus-menerus berada dalam kondisi siaga, yang pada akhirnya dapat membebani sistem kardiovaskular.

Tidak hanya berdampak pada sistem kardiovaskular, tingginya kadar hormon stres dalam tubuh juga dapat mempengaruhi fungsi sistem pencernaan. Stres yang berkepanjangan dapat mengganggu proses komunikasi antara otak dan usus, sehingga dapat memicu berbagai masalah pencernaan. Salah satu gangguan yang sering dikaitkan dengan kondisi ini adalah irritable bowel syndrome (IBS), suatu kondisi yang menyebabkan gejala seperti sakit perut, kembung, diare, atau sembelit yang terjadi secara berulang. Selain IBS, stres yang tidak terkelola juga dapat meningkatkan risiko asam lambung naik (GERD), gangguan motilitas usus, serta penurunan kemampuan tubuh dalam menyerap nutrisi secara optimal. (nei,ist/dya)



# Eye Protection HONOR Pad 9, Solusi untuk Menonton Film dengan Aman

**TEKNOLOGI** Eye Protection di HONOR Pad 9 membuat menonton film saat ngabuburit menjadi lebih nyaman dan aman bagi mata.

HONOR Pad 9 jadi salah satu tablet yang cocok buat menemani momen Ramadan kamu. Perangkat ini cocok banget buat para pekerja multitasking yang juga penggemar marathon film berjam-jam.

Di momen Ramadan ini, HONOR Pad 9 bisa dipakai ngabuburit marathon film sambil menunggu waktu buka puasa selepas bekerja.

HONOR Pad 9 memiliki layar 12,1 inch 2,5K dengan fitur Eye-Comfort Display, nyaman banget, Gais! Layarnya yang lebar itu dibarengi dengan kemampuan refresh rate 120 Hz.

Angka sebesar ini sudah pasti mampu memberikan pengalaman visual yang mulus dan imersif, terutama saat digunakan untuk kebutuhan yang interaktif seperti scrolling, menonton video, dan main game.

Tablet ini bisa kamu bawa ke mana-mana. Enggak cuma buat kerja, tapi bisa kamu nyalakan saat santai di rumah, di restoran sambil menunggu waktu berbuka sampai teman nonton

film saat perjalanan mudik Lebaran.

HONOR Pad 9 memiliki fitur Dynamic Dimming Technology serta fitur Circadian Night Display Technology. Fitur tersebut mampu menyesuaikan tingkat kenyamanan tampilan layar di mata saat siang maupun saat tab dipakai di kondisi area gelap.

Tab ini punya mode Eye Comfort yang mampu mengurangi cahaya biru, bikin mata nggak cepat lelah saat membaca sebelum sahur atau menjelang tidur. Di sekitarnya ada 8 surround speaker dan telah mengantongi sertifikasi Hi-Res Audio,

menjamin kualitas audio yang baik saat dipakai nonton film maupun edit video.

Speakernya juga punya teknologi AI Noise Reduction. Kemampuan ini sangat berguna dipakai meeting online karena mampu menekan suara latar yang berisik.

HONOR Pad 9 ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 serta kapasitas RAM dan internal sebesar 16GB+256GB. Sudah termasuk HONOR RAM Turbo sebesar 8GB untuk performa yang lebih cepat.

Tab ini hadir dengan Smart Bluetooth dan HONOR CHOICE Pencil. Tentu saja, device tambahan macam ini bisa dimanfaatkan untuk sketching hingga mengetik di mana saja, ringkas tanpa hambatan.

Untuk menemani kamu sehabis, ada daya baterai yang besar dengan kapasitas 8.300 mAh yang juga sudah mendukung 35W SuperCharge. Sekali charge, tablet bisa dipakai hingga 11 jam streaming video, 8 jam bermain game, 11 jam scrolling medsos hingga 15 jam streaming musik.

HONOR Pad 9 berjalan dengan sistem operasi MagicOS 7.2 di Android 13. Tablet ini juga dirancang untuk mampu membuka hingga empat aplikasi sekaligus berkat fitur Multi Window di dalamnya. Fitur ini tentu dapat mempermudah kamu untuk belajar atau kerja sambil tetap mengikuti jadwal Ramadan.

HONOR Pad 9, tersedia dengan harga Rp 4.799.000. Setiap pembelian sudah termasuk hadiah GRATIS Smart Bluetooth Keyboard dan HONOR Choice Pencil senilai Rp2.499.000 yang bisa didapatkan di Shopee dan Erafone. (nei,ist/dya)



HARIAN  
**LENERA**  
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"  
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI  
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)  
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)  
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY  
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)  
download edisi digital pada web  
[www.lenteratoday.com](http://www.lenteratoday.com)  
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS  
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



**MEDIA TERVERIFIKASI**

**BIRO: SURABAYA:** YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO ( SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

**PENASEHAT HUKUM** DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

# Sushi Asli vs Palsu: Apa Perbedaannya?

**APAKAH** Anda penggemar sushi? Makanan Jepang ini memang sangat populer di kalangan pecinta kuliner karena rasanya yang lezat dan banyak variasinya.

Sushi sendiri terdiri dari nasi yang dibumbui cuka, lalu dipadukan dengan berbagai topping seperti ikan segar, telur, atau sayuran. Setiap jenis sushi menawarkan pengalaman rasa yang unik. Namun, tahukah kamu bahwa ternyata tidak semua sushi yang dijual benar-benar menggunakan bahan autentik?

Dikutip dari The New York Post, para ahli telah memperingatkan bahwa dalam dunia sushi, apa yang terlihat sering kali tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan, Amerika Serikat menjadi salah satu negara dengan tingkat pemalsuan ikan tertinggi di dunia.

Banyak restoran dan pasar menggunakan ikan murah yang diberi label sebagai salmon, tuna, atau kakap. Setelah diolah dan disajikan dalam bentuk sushi, hampir mustahil bagi konsumen untuk membedakannya dari ikan asli.

Namun, praktik pemalsuan ini tidak selalu disengaja. Para ahli menjelaskan bahwa penggunaan nama ikan yang lebih umum sering dilakukan untuk mempermudah identifikasi bagi pembeli. Misalnya, ikan berlabel 'tuna' sebenarnya bisa berasal dari 68 spesies berbeda.

Secara umum, semakin mahal dan populer suatu ikan sebagai bahan sushi, semakin besar kemungkinan ikan tersebut dipalsukan.

Menurut sebuah studi tahun 2018, kakap adalah jenis ikan yang paling sering diganti di AS dan Kanada. Salah satu penggantinya yang paling umum adalah nila, ikan yang lebih murah dan mudah didapat karena banyak dibudidayakan secara global.

Salah satu kasus yang sering terjadi adalah penggantian tuna dengan escolar, sejenis ikan yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Selain itu, tuna juga memiliki tingkat pemalsuan yang tinggi.

Sebuah penelitian tahun 2018 menemukan bahwa dari 545 sampel tuna yang diuji di enam negara Eropa, sekitar 6,7% ternyata berasal dari

spesies yang berbeda dari yang tertera pada labelnya.

Label tuna sirip biru Atlantik, salah satu ikan sushi paling mahal, sering dipalsukan dan bahkan mencapai 100% di beberapa negara.

Sementara itu, menurut studi Harvard tahun 2020, udang tercatat sebagai salah satu makanan laut yang paling sering diberi label palsu di AS.

Salmon Atlantik hasil budidaya menempati posisi berikutnya sebagai salah satu makanan laut yang sering diberi label menyesatkan, kerap dipasarkan sebagai ikan trout pelangi yang lebih murah, menurut studi lain pada tahun 2020.

Bahaya Sushi Palsu bagi Kesehatan  
Celaknya, celah ini bisa dimanfaatkan oleh oknum nakal yang dengan sengaja menipu pelanggan menggunakan label palsu karena praktik ini relatif mudah dilakukan. "Orang biasa tidak bisa membedakannya. Ada sekitar empat hingga lima jenis ikan yang bisa terlihat seperti kakap merah, padahal bukan," ujar Tony Maltese, direktur bagian seafood di jaringan supermarket Fairway Market New York, dalam wawancara dengan CNBC pada 2018 dikutip dari New York Post, Rabu (26/3/2025).

Tak hanya menyesatkan, sushi palsu juga bisa berbahaya bagi kesehatan. Salah satu pengganti tuna yang sering digunakan adalah escolar, ikan murah yang mengandung lilin alami yang sulit dicerna dan bisa berfungsi sebagai

pencahar alami. Ikan ini pernah menyebabkan babk an

banyak kasus keracunan makanan massal di masa lalu.

Sayangnya, kasus penipuan makanan laut semakin meningkat akibat rantai pasokan yang semakin kompleks dan tidak transparan. Hal ini membuat sulit untuk mengetahui apakah praktik ini dimulai dari kapal penangkap ikan, pedagang grosir, atau pengecer, menurut organisasi konservasi kelautan Oceana.

## Lantas bagaimana cara mengenali sushi dengan ikan asli?

Dr. Cusa menyarankan bahwa secara umum, produk ikan yang dijual di jaringan supermarket dengan label lengkap yang mencantumkan spesies, lokasi tangkapan, dan alat tangkap merupakan pilihan yang lebih baik.

Ia juga menambahkan bahwa produk olahan serta produk kalengan dengan informasi yang minim, atau bahkan tanpa keterangan spesifik, hampir selalu diberi label yang salah. "Saya akan menghindari produk apa pun dengan pelabelan yang buruk atau yang tidak mencantumkan spesiesnya," ucap Cusa.

## Asal Usul Sushi

Sushi berasal dari kata sushi yang merupakan kata sifat untuk rasa masam karena pada awalnya, makanan ini dibuat dari nasi diberi cuka.

Melansir National Today, cikal bakal sushi berawal hidangan bernama narezushi, muncul dalam kosa kata kamus Cina abad keempat.

Narezushi adalah ikan asin yang disimpan dalam nasi fermentasi selama berbulan-bulan. Ini adalah literasi sushi pertama dan dipandang oleh orang Jepang sebagai sumber protein yang penting.

Kemudian ada makanan yang disebut namanare, hidangan ini dibuat dari ikan mentah yang dibungkus dengan lapisan kulit ikan. Ikan dikonsumsi sebelum rasanya berubah. Dari kedua makanan inilah sushi konon berasal, yang awalnya bertujuan untuk pengawetan ikan polanya berubah menjadi masakan jenis baru. Pada Zaman Edo, antara tahun 1600 dan 1800 di Jepang, muncul cikal bakal sushi modern yang kita kenal sekarang yakni ikan dan sayuran dibungkus dengan nasi dan dicampur dengan cuka.

Sama seperti dengan Narezushi, setiap daerah memiliki hidangan cikal bakal sushi variasinya sendiri, tetapi ini yang mendekati versi, yang dikenal kebanyakan orang di dunia saat ini. Pada awal 1800-an, gaya nigirizushi mulai muncul. Ini terdiri dari gundukan nasi dengan sepotong ikan yang menutupinya.

Gempa besar Kanto pada tahun 1923 mengganggu perekonomian Jepang dan membuat banyak orang mengungsi dari Edo Jepang. Orang Jepang terpaksa memulai kembali hidup mereka ke tempat baru membuat sushi semakin dikenal ke seluruh dunia. (nei,ist/dya)



**Komisaris-Direksi .... (dari Hal 1)**

**PRESIDEN** Prabowo Subianto meminta BUMN perbankan mengurangi jumlah komisaris di lembaganya. Prabowo ingin komisaris hanya diisi orang-orang profesional.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai melakukan rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Maret 2026. "Struktur manajemen BUMN perbankan itu arahan Presiden jumlah komisaris diringkas," kata politikus Partai Golkar ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).

Airlangga mengklaim, Bank Mandiri maupun BRI menerima arahan itu. Mereka diklaim sepakat direksi dan komisaris dikurangi. Nantinya, jumlah komisaris akan disesuaikan dengan kebutuhan. "Nanti sesuai kebutuhan. Tapi dibandingkan dengan yang sebelumnya lebih gemuk sekarang lebih ringkas," kata dia.

Komisaris merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi dan memberikan arahan kepada direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

Jumlah minimal anggota Dewan Komisaris bank BUMN adalah tiga orang, dan jumlah maksimalnya sama dengan jumlah anggota direksi.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu sebelumnya pernah mengatakan semua orang yang menempati jabatan komisaris dan direksi BUMN adalah titipan. Pada 2020, Adian menyebut ada sekitar 6.000-7.200 komisaris dan direksi dari seluruh perusahaan pelat merah di Tanah Air, baik perusahaan induk, anak perusahaan, hingga cucu perusahaan BUMN.

"Dari enam ribu sampai tujuh ribu dua ratus komisaris dan direksi BUMN itu menurut saya semua titipan," kata Adian di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, pada 23 Juli 2020 lalu.

Adian mengatakan direksi dan komisaris BUMN titipan sebab selama ini tak pernah ada jalur atau lowongan bagi orang banyak untuk mendaftar. Artinya, ujar dia, tidak setiap orang memiliki akses untuk menduduki jabatan tersebut.

"Enggak ada lowongan kerjanya. 'Dibutuhkan lowongan BUMN A, membutuhkan komisaris dan direksi. Yuk ramai-ramai melamar yuk.' Enggak ada," ujar Adian.

**Dijabat Dirjen Pajak hingga BI**

Diketahui, Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan beberapa bank BUMN terungkap nama-nama pejabat Bank Indonesia (BI) dan Kementerian

Keuangan diangkat sebagai komisaris.

Dua pejabat aktif BI telah resmi ditunjuk menjadi komisaris di Bank BUMN, seperti di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI).

Mereka adalah Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto yang ditunjuk dalam RUPS awal pekan ini sebagai Komisaris Independen BRI. Sementara itu, di BNI, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat diadapuk menjadi komisaris. Kemudian, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI Ida Nuryanti juga ditunjuk untuk menjabat sebagai Komisaris Independen BTN.

Tak hanya pejabat BI, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo diketahui ditunjuk menjadi Komisaris Utama BTN. Suryo menggantikan Chandra M. Hamzah yang sebelumnya diangkat RUPSLB November 2019.

Terkait itu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, pihaknya akan memberikan penjelasan lengkap terkait ini sesuai seluruh proses RUPS bank-bank BUMN selesai dilakukan.

"Kita lihat prosesnya masih terus berlangsung ya, jadi untuk itu belum ada komen dulu," kata Denny saat ditemui di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (28/3/2025).

Meski begitu, ia memastikan, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter akan mematuhi seluruh peraturan yang ada terkait dengan pengisian jabatan komisaris di BUMN. Termasuk bila harus mundur dari jabatan sekarang.

"Artinya BI tetap akan memenuhi semua ketentuan yang ada, tapi untuk resminya belum," tegas Denny.

Aturan tentang pengangkatan komisaris di BUMN sebagaimana diketahui termasuk ke dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**Bertentangan dengan Aturan**

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira turut menyoroti sejumlah pejabat tinggi Bank Indonesia (BI) yang resmi ditunjuk sebagai komisaris di Bank Himbara seperti Bank Mandiri, BNI, dan Bank BTN.

Edi Susianto, misalnya, yang masih menjabat sebagai Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, secara resmi ditunjuk menjadi Komisaris Independen BRI.

Kemudian, Donny Hutabarat yang

masih menjabat sebagai Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI, menduduki kursi Komisaris BNI.

Lalu, Ida Nuryanti yang masih menjabat sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI, menduduki kursi Komisaris Independen Bank BTN.

Menurut Bhima, posisi Komisaris Bank Himbara yang diisi oleh struktur aktif Bank Indonesia jelas bertentangan dengan regulasi BI.

"Penempatan penugasan diluar BI dalam aturan PDG 22/2020 tentang Penugasan Eksternal Bank Indonesia tidak memasukkan lembaga jasa keuangan BUMN," kata Bhima, Rabu (26/3/2025).

Dia menjelaskan, beda halnya jika penugasannya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Asian Development Bank (ADB), dan Bank of International Settlements (BIS), maka tidak masalah sudah ada aturannya.

Tapi kalau pejabat tinggi BI jadi komisaris Bank BUMN, sambung dia, artinya derajat BI sebagai lembaga otoritas moneter melemah.

"Jelas ada risiko conflict of interest karena BI sebagai wasit, kenapa sekarang jadi pemain? Selain itu, BI juga makin turun independensinya," terangnya.

Lebih lanjut, Bhima menduga ada indikasi BI menempatkan orang di Bank Himbara terkait dengan inbreng saham Bank BUMN ke Danantara.

"Masalah masuknya aset Bank BUMN dikelola Danantara setidaknya memicu kekhawatiran risiko sistemik," imbuh dia.

Jika Danantara mengalami masalah gagal bayar, kata Bhima, maka dampaknya uang nasabah Bank BUMN ikut terseret.

Indikasi berikutnya yang juga disoroti Bhima adalah terkait dukungan BI untuk pembiayaan 3 juta rumah. Padahal, menurutnya, untuk mendukung 3 juta rumah, bukan lewat burden sharing atau menjadi Komisaris di Himbara.

"Yang perlu dilakukan BI adalah menurunkan bunga acuan 50 bps agar suku bunga KPR makin terjangkau debitur rumah. Ada salah kaprah yang membuat BI melego independensinya, mirip Orde Baru di mana BI di bawah Kementerian Keuangan," pungkasnya.

Senada, Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan pengangkatan tiga pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai komisaris di bank-bank BUMN sebelum adanya keputusan pemberhentian jabatan, menimbulkan kekhawatiran serius dari perspektif tata kelola dan kepatuhan terhadap peraturan.

"Menurut Peraturan Bank Indonesia, pejabat BI dilarang

merangkap jabatan, termasuk menjadi komisaris di lembaga keuangan, tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan di BI," tegas lelaki yang akrab disapa Didiet.

Langkah pengangkatan yang dilakukan sebelum ada keputusan resmi pemberhentian dari BI ini, menurutnya, menciptakan potensi konflik kepentingan dan merusak independensi otoritas moneter.

"Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip good governance yang dijunjung tinggi oleh institusi sekelas BI dan bank-bank BUMN," jelas dia. (qud, din, rls, ktn, bis/dya)

**KOMISARIS DAN DIRUT BANK BUMN YANG DISETUJUI DALAM RUPS 2025:**



- Komisaris Utama: **Suryo Utomo**
- Wakil Komisaris Utama: **Dwi Ary Purnomo**
- Komisaris: **Fahri Hamzah**
- Komisaris Independen: **Ida Nuryanti**
- Komisaris Independen: **Pietra Machreza Paloh**
- Komisaris Independen: **Panangian Simanungkalit**
- Direktur Utama: **Nixon LP Napitupulu**



- Komisaris Utama/Komisaris Independen: **Omar Sjawaldy Anwar**
- Wakil Komisaris Utama: **Tedi Bharata**
- Komisaris: **Suminto**
- Komisaris: **Donny Hutabarat**
- Komisaris Independen: **Vera Febyanthi**
- Komisaris Independen: **Didik Junaidi Rachbini**
- Direktur Utama: **Putrama Wahyu Setyawan**



- Komisaris Utama/Independen: **Kuswiyoto\***
- Wakil Komisaris Utama/Independen: **Zainudin Amali**
- Komisaris: **Muhammad Yusuf Ateh**
- Komisaris: **Luky Alfirman\***
- Komisaris: **Yuliot\***
- Komisaris Independen: **Mia Amiati\***
- Direktur Utama: **Darmawan Junaidi**



- Komisaris Utama: **Kartika Wirjoatmodjo**
- Wakil Komisaris Utama/Komisaris: **Parman Nataatmadja**
- Komisaris: **Helvi Yuni Moraza**
- Komisaris Independen: **Edi Susianto**
- Komisaris Independen: **Lukmanul**
- Direktur Utama: **Hery Gunardi**

*\*efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku*



**Segenap Pimpinan dan Staf  
 DPRD Kota Surabaya**

*Mengucapkan*

**Selamat Hari Raya**

**IDUL FITRI  
 2025/1446 H**

*Taqabbalallahu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum.*

Mohon maaf lahir dan batin.

Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dengan  
 kebahagiaan dan kedamaian



**Adi Sutarwijono**  
 Ketua DPRD Kota Surabaya

**Bahtiar Rifai**  
 Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

**Laila Mufidah**  
 Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

**Arif Fathoni**  
 Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya